PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 5 No. 01 Januari (2025) e-ISSN: 2797-0469

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN BOJONEGORO

Salsa Eka Putri
Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
salsaeputri10@gmail.com

M. Kendry Widiyanto
Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Hasan Ismail
Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Bojonegoro Regency is a region that is among the top three as the highest rice producers in East Java Province. Farmers as the majority of the population's livelihoods, make the agricultural sector a supporter of economic growth. However, in the last few years, rice production in Bojonegoro has continued to decline due to pest attacks and changes in seasons, resulting in losses for farmers. Farmers will not receive compensation, because the agricultural land they own is not registered with the Rice Farming Business Insurance (AUTP). The Rice Farming Business Insurance Program (AUTP) is a program created by the Ministry of Agriculture as a form of protection and development of the agricultural sector with the main objective of overcoming the risk of damage to rice crops experienced by farmers due to natural disasters, pest attacks, and plant disturbances. Through the application of collaborative governance analysis in the implementation of government, it is hoped that it will be a strategic step in collaboration to realize the foundation between the government and the community, in achieving common goals by combining the views of several elements from the government side in order to ensure that a policy is realized properly in the community.

Keywords: *Rice Farming Business Insurance, Collaboration, Farmers.*

ABSTRAK

Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang menjadi tiga besar sebagai produsen padi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Petani sebagai mayoritas mata

pencaharian penduduknya, menjadikan sektor pertanian penyokong pertumbuhan ekonomi. Namun sejak beberapa tahun terakhir hasil produksi padi di Kabupaten Bojonegoro terus menurun disebabkan oleh serangan hama dan perubahan musim, akibatnya menyebabkan para petani merugi. Petani tidak akan mendapatkan ganti rugi, akibat lahan tani yang dimiliki tidak terdaftar dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan suatu program yang dibuat oleh Kementerian Pertanian sebagai bentuk perlindungan dan pengembangan sektor pertanian dengan tujuan pokok menanggulangi risiko kerusakan tanaman padi yang dialami oleh petani akibat bencana alam, serangan hama, dan gangguan tanaman. Melalui penerapan analisis collaborative governance dalam pelaksanaan pemerintahan diharapkan sebagai langkah strategis kolaborasi untuk mewujudkan fondasi antara pemerintah dan masyarakat, dalam mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan pandangan beberapa elemen dari sisi pemerintah agar dapat memastikan sebuah kebijakan terealisasi dengan baik dimasyarakat.

Kata Kunci: *Asuransi Usaha Tani Padi, Kolaborasi, Petani.*

A. PENDAHULUAN

Pertanian adalah salah satu dari bidang penyumbang produk domestik bruto (PDB) yang besar. Padi menjadi produk kunci dalam bidang pertanian, yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Tiga tahun terakhir tercatat luasan panen tanaman padi di Indonesia semakin menurun. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 penurunan mencapai 1,64%, sedangkan tahun 2023 ke 2024 mencapai hingga 2,45% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 1. Data Luasan Panen Padi Tahun 2022-2024

Tahun	Luasan Panen Tanam Padi	Penurunan
2022	10,45 juta hektare	238,97 ribu hektare
2023	10,20 juta hektare	255,79 ribu hektare
2024	10,05 juta hektare	167,57 ribu hektare

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Masalah tersebut jika tidak ditindak lajuti oleh pemerintah secara serius bukan hanya bertadamapak kepada para petani secara luas namun juga mengjkhawatirkan bagi persediaan pangan pokok Indonesia.

Provinsi Jawa Timur disebut sebagai wilayah di Indonesia yang menjadi salah satu produksi padi terbesar. Kabupaten Bojonegoro merupakan tiga besar wilayah penghasil padi di provinsi Jawa Timur, serta yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sekitar 310.388 orang menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Petani sebagai mata pencaharian utama tersebut membuat Kabupaten Bojonegoro memiliki luasan lahan pertanian mencapai 83 ribu hektare (Ramadhana, 2022). Kabupaten Bojonegoro mampu menyumbang persediaan padi secara nasional dan Jawa Timur sekitar 17% (Alfiatun Siti, 2023). Produksi padi beberapa tahun ini, Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Luas hasil gabah kering giling (GKG) pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 77.293 ton, jika dibanding

dengan 2023 menghasilkan sebesar 391.437 ton namun juga mengalami penurunan dan menjadi 314.144 ton tahun ini (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2022).

Bencana alam menjadi salah satu penyebab penurunan produksi padi disetiap tahunnya selain itu juga adanya hama dan penyakit tanaman. Pastinya faktor penyebab kerugian yang signifikan tersebut harus ditanggung oleh petani yang kebanyakkan hanyalah petani kecil (penggarap). Radar Bojonegoro memberitakan pada tahun 2024 petani di Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian sebesar 43,87 hektare diakibatkan oleh kegagalan panen. Kegagalan panen pada lahan pertanian 43,87 hektare tersebut tidak menerima ganti rugi, akibat lahan tidak terdaftar dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) (Ramadhana, 2024a).

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asuransi Pertanian) merupakan perangkat digital yang diciptakan sebagai pembatu dalam proses pendaftaran hingga pemberian bantuan pada petani. Aplikasi tersebut tampil untuk meningkatkan layanan dengan penyederhanaan system (Agriculture 4.0). Petani yang ingin mengajukan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) harus memenuhi persyaratan utama, yaitu

a) Umur padi lebih dari 10 hari setelah tanam (DAP).
b) Beras telah disimpan lebih dari 30 hari (Teknologi Tabula).
c) Besaran kerusakan mencapai 75% atau lebih, di setiap kawasan kekayaan alam.

Oleh karena itu, kerusakan yang dipertanggungkan adalah kerusakan tanaman pada setiap lahan budidaya perlahan pertanian yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh bencana alam, serangan hama, atau gangguan penyakit tanaman, dan intensitas kerusakannya 75% atau lebih dari setiap area rusak luas petak alami (Kementerian Pertanian, 2020).

B. KAJIAN TEORITIS

Collaborative Governance didefinisikan sebagai tata kelola satu atau lebih lembaga publik, yang terkait dengan pemangku kepentingan non-publik dalam menjalankan prosedur ketetapan bersama dalam mengelola aset publik. Model *Collaborative Governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas empat faktor, yaitu Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif, Desain Kelembagaan, dan Proses Kolaborasi.

Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi adalah bentuk partisipasi bersama yang mengandalkan kepercayaan dan keterlibatan yang efektif untuk mencapai tujuan bersama (Larson et al., 2010). Kolaborasi adalah proses dalam peraturan, pemrosesan, dan lokalitas lembaga formal disesuaikan dengan kepentingan atau kegiatan secara langsung atau tidak langsung dalam menjangkau tujuan dan menyelesaikan masalah yang telah disetujui menurut Ansell dan Gash dalam (Maharashtri et al., 2023).

Pengertian Governance

Governance diartikan sebagai cara mencapai kekuasaan negara dalam memberikan produk atau jasa untuk masyarakat (Sedarmayanti & Yaya Muliyana A. Aziz, 2020). Governance juga dipandang sebagai tata aturan yang memastikan

keputusan publik dibuat dan tindakan publik dilaksanakan, dari sudut pandang untuk mempertahankan makna dasar hukum suatu negara dalam menghadapi masalah, aktor, dan lingkungan yang berubah (Osborne, Stephen P., 2010).

Kerangka Konseptual

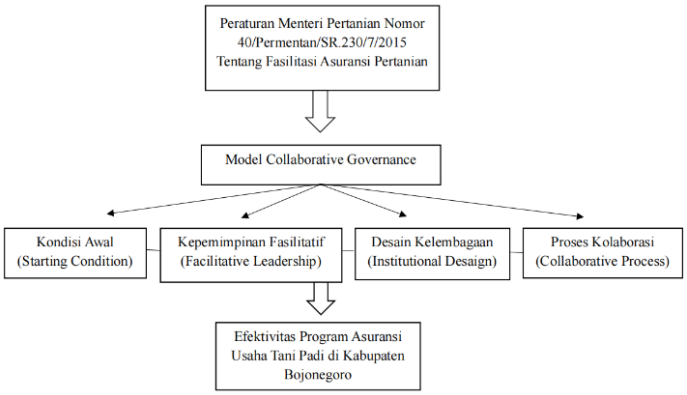

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode pada penelitian yang lebih banyak dipergunakan dilingkup ilmu sosial, yang menekankan pada hipotesis-deduktif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang tersusun atas kalimat-kalimat, yang dihasilkan dari bentuk tertulis atau lisan partisipan yang dapat diamati. Metode analisis dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2010), yaitu mencari dan menyusun data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan menyajikan temuan penelitian. Penelitian ini memiliki satu fokus, yaitu penerapan *collaborative governance* dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori Ansel dan Gash.

2. Objek dan lokasi penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti sebagian besar dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, dengan lokasi penelitian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, tiga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiga kecamatan berbeda, tiga Perwakilan Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Bojonegoro dari tiga kecamatan berbeda, dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jawa Timur.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil peneliti, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Perwakilan Kelompok Tani, dan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Kabupaten Bojonegoro ditarik menjadi objek penelitian karena menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang berkontribusi besar dalam pemasok sumber pangan utama Masyarakat Indonesia yaitu beras.

Jenis Data dan Sumber data

Data adalah suatu hal yang belum memiliki arti untuk pihak penerimanya

yang mana masih memerlukan proses pengolahan. Data dapat berupa informasi mengenai suatu situasi, gambar, angka, huruf, atau lambang simbolik. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

Data Primer

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan penelitian mendalam mengenai implementasi program "Asuransi Usaha Tani Padi" sebagai kebijakan pemerintah untuk membantu petani mengatasi kerugian akibat kerusakan tanaman padi.

Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi memo dan dokumen, publikasi pemerintah, dan internet. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari internet, hasil survei berupa wawancara dengan kelompok tani dan dinas terkait.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, yang menjadi dasar hukum untuk implementasi Asuransi (AUTP) dan diatur pelaksanaannya dalam peraturan terbaru Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dimaksudkan sebagai perlindungan bagi petani akibat kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan dari kegagalan panen, maka dengan itu petani memiliki modal operasional untuk penanaman musim berikutnya. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah program kolaborasi yang dilaksanakan oleh beberapa aktor, pada penelitian ini didasarkan dari hasil wawancara pada para aktor pelaksana kebijakan diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Kelompok Tani, dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jawa Timur. Adapun hasil penelitian ini, menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) untuk mengukur pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari beberapa aktor pelaksana program, diantaranya

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi saat awal kolaborasi terjadi biasanya adanya kerja sama antara pemangku kepentingan atau pihak terkait, memiliki tujuan dan langkah bersama untuk mengatasi masalah yang ada. Kolaborasi akan sulit terjadi pada awal pelaksanaan didominasi pada permasalahan kepercayaan (Ansell & Gash, 2008b). Kondisi awal dari pertanian di Kabupaten Bojonegoro sebelum adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), pada lingkungan dinas seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Balai Penyuluhan Pertanian sudah ada kesiapan karena program tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dan menjadi dasar hukum untuk implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), namun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro merasa program ini baru benar-benar dijalankan sejak 2016. Hal tersebut juga terjadi pada PT Asuransi Jasa Indonesia karena Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

merupakan *pilot project* dari Kementerian Pertanian yang telah bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia sejak tahun 2012. Perusahaan asuransi pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, berdasarkan Surat Penugasan Menteri (BUMN) Nomor 314/MBU/05/2016 tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian. Namun hal berbeda terjadi pada kelompok tani, sosialisasi yang dijalankan oleh lembaga terkait tidak begitu dihiraukan akibat tidak adanya kepercayaan pada program pemerintah dan pola pikir petani yang sederhana. Kerusakan lahan pertanian sebelum adanya program Asuransi Usaha Tani Padi kerugian hanya ditanggung oleh petani sendiri dan sebagian petani merasa itu hal yang wajar.

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan adalah kunci dalam melakukan kerja sama mengajak para pemangku kepentingan diskusi, serta mengawal menepis masa-masa sulit dalam proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008b). Kepemimpinan yang ada di setiap lembaga alam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berjalan dengan baik. Kepercayaan yang tidak didapatkan dari kelompok tani pada awal implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), hingga saat ini 10 tahun program berjalan dari tahun 2015 hingga sekarang menunjukkan hasil yang signifikan. Namun nilai signifikan tersebut tidak dapat dianalisis sejak awal penerapan program. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro hanya didapatkan hasil implementasi program sebagai berikut.

Tabel 2. Data Jumlah Pendaftar Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

TAHUN	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI	LUAS (Ha)	REALISASI	PAGU ANGGARAN
2019	81	8.087	3.333,17	119.994.120	2.160.000.000
2020	96	9.642	4.550,99	505.683.000	507.150.000
2021	441	47.548	20.721,00	745.956.000	745.956.000
2022	311	34.571	17.930,00	645.480.000	645.480.000
2023	332	36.010	17.500,00	630.000.000	630.000.000
2024	457	49.529	24.800,00	892.800.000	892.800.000
JUMLAH	1.718	185.387	88.835,16	2.017.113.120	4.058.586.000

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro

Data pelaksanaan program Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari tahun 2015-2018 tidak didapatkan. Hal tersebut harusnya tidak terjadi karena data implementasi program nantinya menjadi bahan evaluasi, tentang sebuah program apakah masih layak dan butuh untuk tetap diterapkan. Kredibilitas dari pemangku kepentingan dimata masyarakat nantinya menyebabkan adanya pandangan keraguan (tidak akuntabel). Kredibilitas teknis setiap kelembagaan yang ada diukur melalui kajian di lapangan dengan hasil pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat. Berdasarkan data jumlah pendaftar Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang didapatkan, partisipasi petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terus meningkat hal tersebut juga tidak lain karena adanya Program Petani Mandiri (PPM) yang merupakan program yang dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro terdahulu melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri (PPM) disebutkan bahwa salah satu manfaat PPM, yaitu mendapatkan asuransi gagal panen pertanian. Program AUTP seluruhnya (100%) dibiayai oleh

pemerintah kabupaten diambil dari dana APBD II tanpa adanya penanggungan 20% kepada petani atau senilain Rp 36.000. Namun sampai sekarang program tersebut masih ditangguhkan akan dilanjut atau tidak belum ada kejelasan informasi yang didapat dan belum ada evaluasi terhadap peraturan tersebut (perubahan periode bupati).

3. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan merujuk pada aturan dasar dalam kolaborasi, yang menjadi kunci untuk keabsahan hukum dalam berjalannya kolaborasi. Tata kelola kolaborasi (*collaborative governance*) ditekankan pada proses transparan dan komprehensif bagaimana suatu kolaborasi dijalankan (Ansell & Gash, 2008b). Proses kolaborasi yang terlaksana dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terdapat empat elemen yang berperan penting, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, PT Asuransi Jasa Indonesia, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Kelompok Petani. Setiap aktor yang memangku kepentingan dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memiliki bentuk kelembagaan yang jelas serta memiliki tugas masing-masing.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro

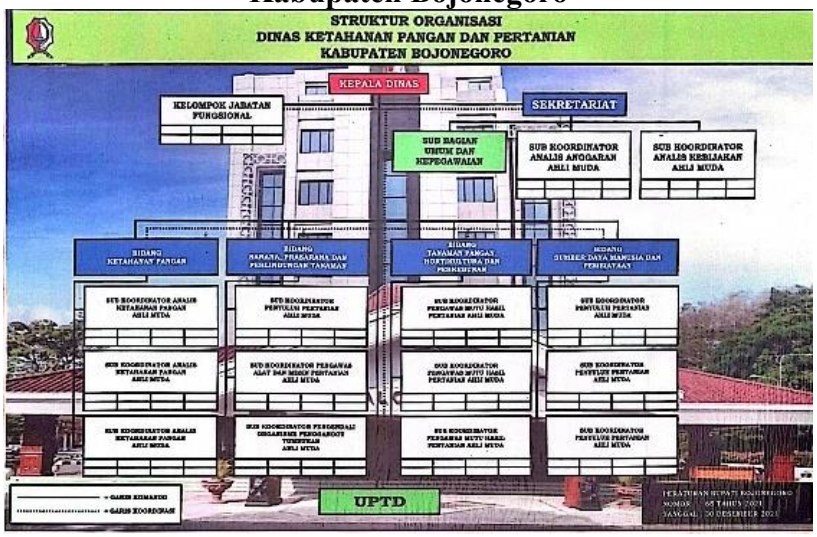

Sumber: Gambar Dokumentasi oleh Penulis

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam struktur organisasinya memiliki empat bidang pembagian kerja dibawah kepala dinas. Pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam pelaksanaannya dibawah naungan Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman dan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan dan dalam pelaksanaan lapangannya dilakukan khusus oleh Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan tanaman.

Gambar 2. Struktur Kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

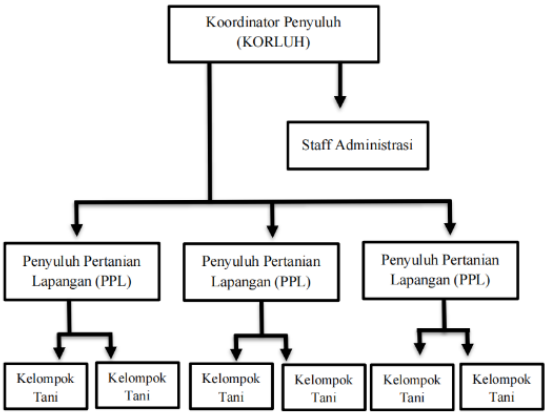

Sumber: Tabel Olahan Penulis

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan lembaga pertanian ditingkat kecamatan dibawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) bertujuan untuk membangun sektor pertanian agar terus berkembang di wilayah kecamatan serta dapat memberdayakan petani dan pelaku usaha dibidang pertanian dengan pendampingan serta penyaluran fasilitas yang tersedia. Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di setiap tingkat kecamatan selalu dibantu oleh tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui *monitoring* terjadwal untuk mendatangi kelompok-kelompok tani sesuai wilayah binaan masing-masing PPL.

Gambar 3. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia

Sumber: PT Asuransi Jasa Indonesia

Gambar 4. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

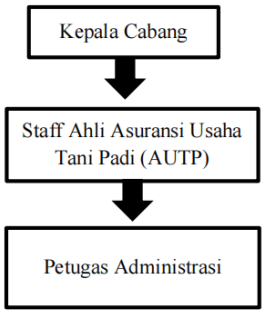

Sumber: Tabel Olahan Penulis

PT Asuransi Jasa Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengutamakan profit dalam melaksanakan program dan produknya, sehingga PT Asuransi Indonesia memiliki struktur organisasi yang kompleks. PT Asuransi Indonesia memiliki struktur organisasi pusat yang mengatur dan bertanggung jawab atas jalannya kinerja program dan produk dari PT Asuransi Jasa Indonesia yang ada di cabang (tersebar diseluruh Indonesia). Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sendiri merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan memiliki sub-cabang khusus.

Gambar 5. Struktur Organisasi Kelompok Tani

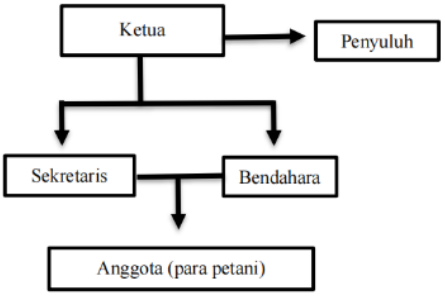

Sumber: Tabel Olahan Penulis

Kelompok Tani pada dasarnya tidak memiliki aturan tertulis dalam pembentukan struktur organisasinya, sebagian besar hanya terdiri dari pengurus inti yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara lalu diikuti anggota yang merupakan para petani. Para petani selama ini mayoritas menjalankan tugas kepengurusan tersebut secara sukarela.

Desain kelembagaan merupakan elemen kunci dalam konsep kolaborasi. Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini tidak memiliki kesulitan untuk mengimplementasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) karena sudah adanya pembagian kerja dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dari para pemangku kebijakan terkait. Namun perlunya pengawasan dalam berjalannya

setiap kelembagaan agar terlaksana keseluruhan.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaboratif adalah sesuatu yang berkembang secara bertahap, proses pembangunan yang melalui 3 tahapan, yaitu *problem setting*, *direction setting*, dan implementasi (Ansell & Gash, 2008b). Pertama pada tahap *problem setting* Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan mengelompokkan pada wilayah yang rawan terjadinya kerusakan hasil tani akibat bencana alam dan hama, serta melakukan sosialisasi bersama dinas-dinas terkait kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pada tahap *direction setting* didapatkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kenyataan di lapangan, hingga pada tahap ini dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang pada awalnya pemerintah pusat hanya menanggung 80% pembiayaannya dan 20% harus dibayarkan mandiri oleh petani, khusus pada Kabupaten Bojonegoro pembiayaan program AUTP seluruhnya dibiayai oleh pemerintah kabupaten diambil dari APBD melalui Kartu Petani Mandiri (KPM). Hal tersebut selain mempermudah petani dalam menjangkau program AUTP juga karena sektor pertanian merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Bojonegoro, sehingga program KPM seperti wujud tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah kepada ekonomi masyarakatnya. Tahapan terakhir yaitu implementasi, pada tahapan ini seluruh elemen dinas dan masyarakat (petani) bergerak bersama-sama. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) senantiasa menggerakkan kelompok tani dengan pelaksanaan koordinasi dari PPL BPP Kecamatan serta adanya pemanfaatan kemajuan teknologi, dalam pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) bentukan dari PT Asuransi Jasa Indonesia.

Proses kolaborasi yang terjadi dintara empat pemangku kepentingan pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan Kelompok Tani mewujudkan proses berkesinambungan yang baik. Selain melalui tiga proses kolaborasi dalam penerapannya *collaborative governance* dapat dicapai melalui beberapa hal Ansell dan Gash, seperti

1. Dialog tatap muka

Pendekatan dilakukan agar tercapai kepercayaan Masyarakat, yang dilakukan dengan sosialisasi dari dinas terkait di tiap-tiap daerah. Mulai dari pertemuan hingga sistem *door to door* dilakukan agar anggota kelompok tani aktif dalam program-program yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Pembangunan kepercayaan

Proses sosialisasi bukan hanya dilakukan melalui forum resmi dari pemerintah, namun juga dilakukan melalui forum-forum kecil terdekat di masyarakat seperti saat para warga (petani) ada perkumpulan atau sekadar menikmati waktu bersama (bertetangga).

3. Komitmen terhadap proses

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperlancar program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dimasukkan kedalam salah satu dari lima manfaat Kartu Petani Mandiri (KPM) yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang

Program Petani Mandiri (PPM).

4. Menyamakan pemahaman

Titik dalam proses kolaborasi para pihak pemangku kepentingan harus menumbuhkan pemahaman bersama mengenai tindakan dan hasil sementara dalam mewujudkan tujuan bersama. Pemahaman ini sudah tercapai pada wilayah di Kabupaten Bojonegoro yang memang rawan pada kerusakan tanaman padi terutama akibat bencana alam.

5. Hasil sementara

Kesimpulan yang dapat diambil untuk sekarang terhadap tingkat kepercayaan dan tujuan yang telah dibangun pemangku kepentingan dari keseluruhan kolaborasi. Kabupaten Bojonegoro telah mengimplementasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan mempermudah para petani dengan mengambil pembiayaan keseluruhan dari APBD dan telah mencapai kepercayaan yang tinggi pada wilayah yang rawan kerusakan setiap pergantian musim.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan analisis teori *collaborative governance*, dapat ditarik kesimpulan bahwa diimplementasi program terus berkembang dalam kurun waktu 2015-2025. Namun kecenderungan dapat terlihat pada wilayah rawan kerusakan tanaman padi akibat bencana alam dan pada wilayah yang aman bahkan tidak mengerti adanya program AUTP. Maka pelaksanan di lapangan dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Bojonegoro, yaitu kondisi awal Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) para dinas pemangku kepentingan sudah siap dengan program baru tersebut karena merupakan pilot project yang sudah lama dicanangkan oleh Kementerian Pertanian namun pada kelompok tani adanya gesekan kepercayaan dengan tingkah pikir petani yang sederhana.

Pada kepemimpinan fasilitatif disetiap lembaga pelaksanaan AUTP selalu memfasilitasi sosialisasi yang terjadi baik formal maupun non-formal. Namun nilai proses pelaksanaan program tidak dapt dianalisis sejak awal implementasi akibat data tahun 2015-2018 tidak ditemukan arsip dari Dinas Ketanan Pangan dan Pertanian. Desain Kelembagaan salah satu kunci penerapan kolaborasi yang terlaksana baik di Kabupaten Bojonegoro implementasi program AUTP dijalankan dengan struktur yang jelas dan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Proses Kolaborasi yang terjadi diantara empat komponen pemangku kepentingan (pelaksana) mewujudkan proses berkesinambungan yang baik. Proses kolaborasi ditekankan pada komunikasi yang progresif.

Saran

Peneliti dapat menyarankan beberapa hal dari hasil kesimpulan yang didapat, yaitu pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tetap menganggarkan dana APBD untuk program disektor pertanian seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) karena memiliki penduduk mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan penerapan

program yang ada diimbangi dengan evaluasi yang lebih sistematis agar semua dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSAKA

Alfiatun, S. (2023). *Pemodelan Ketersediaan Beras di Kabupaten Bojonegoro Menggunakan Regresi Spatial Error Model (SEM) dan Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA)*.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik Perkembangan Luas Panen Padi di Indonesia 2024*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2022, May 24). Hasil Pertanian Padi Bojonegoro Terus Meningkat. *Https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Hasil-Pertanian-Padi-Bojonegoro-Terus-Meningkat*.

Kementerian Pertanian. (2020). *Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2020*.

Larson, P., Wyckoff-Baird, B., Stern, A., Brown, M., Anderson, A., Smith-Sreen, P., & Golder, B. (2010). *Stakeholder Collaboration Building Bridges for Conservation*.

Maharashtri, S., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). *Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita Di Kota Semarang*.

Osborne Stephen P. (2010). *The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Taylor & Francis Group.

Ramadhana, Y. E. (2022, June 3). Mata Pencaharian Penduduk Bojonegoro Didominasi dari Pertanian. *SuaraBanyuurip.Com*. https://suarabanyuurip.com/2022/06/03/mata-pencaharian-penduduk-bojonegoro-didominasi-dari-pertanian/

Ramadhana, Y. E. (2024, August 30). 43,87 Hektare Lahan Pertanian Bojonegoro Gagal Panen, Tidak Mendapat AUTP Karena Belum Daftar. *Jawa Pos Radar Bojonegoro*. https://radarbojonegoro.jawapos.com/ekonomi/715034728/4387-hektare-lahan-pertanian-bojonegoro-gagal-panen-tidak-mendapat-autp-karena-belum-daftar

Sedarmayanti, & Yaya Muliyana A. Aziz. (2020). *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan* (R. Trisnadewi, Ed.; Cetakan Ke). PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.